KOMITMEN PEMIMPIN DAERAH DALAM PEMARTABATAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS KOTA BOGOR)

Commitment of Regional Leaders to Prioritize The Use of Indonesian in The Public Sphere (Case Study of Bogor City)

Devyanti Asmalasari
Balai Bahasa Jawa Barat
Pos-el: dv_soenda@yahoo.com

Abstrak

Kondisi kebahasaan di ruang publik saat ini memperlihatkan semakin banyaknya pemakaian bahasa yang menggunakan bahasa asing atau campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kota Bogor yang lokasinya berdekatan dengan ibukota negara tentu saja memiliki tingkat kompleksitas penggunaan bahasa di ruang publik yang jauh lebih kompleks dibanding daerah-daerah lain yang ada di Jawa Barat. Kondisi ini tentu saja membutuhkan peran pemangku kepentingan berupa komitmen pemimpin daerah untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor sudah baik dengan diwujudkannya janji pemimpin daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik.

Kata-kata kunci: Komitmen, pemimpin daerah, pemartabatan bahasa negara, ruang publik

Abstract

Linguistic conditions in the public space today show the increasing use of language using foreign languages or a mixture of Indonesian and foreign languages. Whereas the prioritization of Indonesian in the public space is a mandate from Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Emblems, and the National Anthem. The city of Bogor, which is located adjacent to the state capital, of course has a level of complexity in the use of language in public spaces that are far more complex than other regions in West Java. This condition, of course, requires a stakeholder role in the form of the commitment of regional leaders to prioritize the use of Indonesian in the public sphere. The purpose of this study was to describe the commitment of regional leaders in the prioritization of state languages in public spaces. The method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the commitment of regional leaders in the prioritization of state languages in public spaces in the city of Bogor has been good with the realization of the promise of regional leaders in the form of Bogor

Mayor Regulation Number 62 of 2017 concerning Indonesian Language and Sundanese Language in Public Spaces.
Keywords: *Commitment, regional leader, prioritization of state language, public space*

PENDAHULUAN

Ruang publik di Indonesia saat ini telah berubah menjadi ruang tempat bertarungnya tiga buah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Selama ini ada ketakutan di dalam masyarakat bahwa keberadaan bahasa Indonesia dapat mengancam keberlangsungan bahasa daerah. Akan tetapi, jika kita melihat maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik, justru bahasa Indonesia kini terancam keberlangsungannya oleh bahasa asing.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengatur ruang penggunaan ketiga bahasa tersebut di ruang publik. Akan tetapi, karena tidak adanya ancaman sanksi dalam undang-undang tersebut, dapat kita lihat perkembangan ruang publik kita saat ini marak dengan pengutamaan penggunaan bahasa asing. Selain itu, ada anggapan sebagian dari masyarakat bahwa penggunaan bahasa asing terasa lebih unggul dan bergengsi dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Jika kita amati ruang publik kita saat ini, penggunaan bahasa gado-gado -bahasa Indonesia dan bahasa asing- sudah memenuhi ruang publik kita terutama di kota-kota besar. Bahkan dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa asing ini lebih diutamakan. Kondisi itu terlihat pada papan iklan, kain rentang, pengumuman, bahkan pada nama lembaga-lembaga resmi. Gejala pengutamaan penggunaan bahasa asing menggejala di seluruh wilayah Indonesia.

Kesadaran untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tidak cukup dengan imbauan ataupun undang-undang. Undang-undang kebahasaan yang tanpa sanksi tentu saja akan sulit diberlakukan untuk mendisiplinkan masyarakat. Kehadiran undang-undang sebetulnya penting sekali, tetapi upaya pemartabatan bahasa tidak cukup hanya mengandalkan hadirnya undang-undang saja. Perlu ada upaya tambahan yang berupa program-program nyata yang bisa menjadi suatu gerakan besar di masyarakat.

Balai Bahasa Jawa Barat telah melakukan beberapa proyek percontohan penertiban bahasa di kabupaten/kota di Jawa Barat agar penggunaan bahasa di ruang publik lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Kota Bogor dalam kurun waktu tahun tiga tahun terakhir ini sangat mendukung kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Oleh karena itu, Kota Bogor kemudian dijadikan sebagai proyek percontohan penertiban bahasa di ruang publik di Jawa Barat.

Keberhasilan program pemartabatan bahasa negara di ruang publik di suatu daerah dapat berjalan dengan adanya dukungan penuh dari pemimpin daerahnya. Di Kota Bogor, pemimpin daerahnya memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam pemartabatan bahasa negara. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi Wali Kota Bogor yang cukup besar untuk mendukung kegiatan pemartabatan ini. Tidak hanya itu, Wakil Wali Kota, Sekda, dan dinas-dinas terkait pun menyambut baik dan sangat membantu kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik ini. Mereka semua sadar betul bahwa ini merupakan tugas bersama untuk saling membantu dan melaksanakan pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Berdasarkan uraian kondisi tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran komitmen yang dimiliki pemimpin daerah dalam program pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Komitmen Pemimpin Daerah dalam Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik (Studi Kasus Kota Bogor)".

LANDASAN TEORI

a. Komitmen Pemimpin

Komitmen pemimpin merupakan salah satu faktor kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Adisasmita (2011) menyatakan bahwa dalam pencapaian misi sebuah organisasi terdapat faktor-faktor kunci keberhasilan yang berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan internal organisasi berupa keunggulan sumber daya manusia, mekanisme/sistem, standar pelayanan, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor kunci keberhasilan eksternal organisasi berupa komitmen pemerintah atau komitmen yang seharusnya ada yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan, adanya komitmen masyarakat atau komitmen yang seharusnya dibangun dalam masyarakat, dan lain-lain.

Pengertian komitmen dinyatakan oleh Ratminto dan Winarsih dalam Pasolong (2015, hlm.15) yang berarti “keteguhan hati, tekad yang mantap untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini’. Dengan demikian, komitmen merupakan sebuah janji dalam mewujudkan sesuatu. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wahyusumidjo (1994) bahwa komitmen pemimpin merupakan sikap batin, janji seorang pemimpin untuk mewujudkan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Oleh karena itu, komitmen pimpinan ini berhubungan erat dengan tugas dan peran pemimpin dalam sebuah organisasi.

Tugas pemimpin dalam suatu birokrasi menurut Pasolong (2015) sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pemimpin pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Sementara, peran pemimpin birokrasi terdiri atas peran pengambilan keputusan, peran memengaruhi, peran memotivasi, peran antarpribadi, dan peran informasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas, fungsi, dan peran pemimpin dalam suatu birokrasi sangatlah penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini senada dengan pendapat Adisasmita (2011) yang menyatakan bahwa komitmen dari pimpinan daerah harus didukung oleh banyak hal, seperti kemauan politik dari jajaran pimpinan, staf dan pelaksana yang kompeten, serta dibuatnya peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan komitmennya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

b. Pemartabatan Bahasa

Balai Bahasa Jawa Barat, merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai lembaga yang menangani bidang kebahasaan di Jawa Barat, Balai Bahasa Jawa Barat memiliki program Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik. Program ini merupakan upaya untuk mengutamakan penggunaan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia di ruang-ruang publik, seperti jalan, kantor, mal, hotel, restoran, rumah sakit, dan tempat wisata. Upaya ini dilakukan dengan mengajak pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama bergabung dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik adalah mengumpulkan data penggunaan bahasa di ruang publik. Pada awal tahun 2015, Balai Bahasa Jawa Barat melakukan pemantauan di 27 kota/kabupaten

yang ada di Jawa Barat dengan cara mengambil foto pemakaian bahasa di ruang publik. Hasil dari pemantauan tersebut terkumpul 26.000 foto pemakaian bahasa yang diambil di hotel, mal, tempat wisata, museum, rumah sakit, stasiun kereta, terminal bus, jalan raya, dan tempat umum yang lain.

Hasil pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik tersebut kemudian diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan ranah-ranahnya. Kemudian, kosakata/istilah asing yang terdapat di ruang publik itu dianalisis dan dibuat padanannya dalam bahasa Indonesia. Dari hasil pemadanan tersebut, kemudian dibuat buku "Senarai Istilah Asing-Indonesia di Ruang Publik". Langkah selanjutnya dalam program pemartabatan bahasa negara di ruang publik adalah menyelenggarakan lokakarya hasil pemantauan bahasa di ruang publik. Lokakarya ini telah dilaksanakan pada tanggal 10—12 Juni 2015, di Hotel Sukajadi, Jalan Sukajadi Nomor 176 Bandung. Lokakarya tersebut membahas hasil pemantauan bahasa di ruang publik dan menghasilkan rekomendasi agar secepatnya dilakukan penertiban penggunaan bahasa di ruang publik melalui aksi penyadaran dan pendampingan oleh pemangku kepentingan. Segera setelah selesai lokakarya kemudian dilaksanakan sosialisasi hasil lokakarya di kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Adapun rangkaian kegiatan Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik di Kota Bogor adalah sebagai berikut.

a) Audiensi dengan pemimpin daerah
b) Pemantauan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik
c) Lokakarya Penggunaan Bahasa di Ruang Publik
d) Sosialisasi Hasil Lokakarya Pemartabatan Bahasa di Ruang Publik
e) Lomba Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik
f) Anugerah Kawistara
g) Penandatangan Nota Kesepahaman
h) Penerbitan Peraturan Wali Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitiatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa, dan tafsiran mereaka

tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah pemimpin daerah di Kota Bogor. Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Metode deskriptif menurut Ratna (2010) merupakan metode yang sangat umum dan dengan sendirinya dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah ilmu pengetahuan. Metode ini berusaha memahami objek dengan cara menguraikana, mengklasifikasikan, memisah-misahkan, kemudian disajikan secara naratif. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi berdasarkan laporan kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor yang dilaksanakan Balai Bahasa Jawa Barat dalam kurun waktu 2015—2017.

PEMBAHASAN

Komitmen pemimpin daerah Kota Bogor dalam pemartabatan bahasa negara dapat dilihat dari apresiasi Wali Kota Bogor yang cukup besar untuk mendukung kegiatan ini. Rangkaian kegiatan Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik dimulai dari audiensi dengan Wali Kota Bogor**,** kemudian dilanjutkan dengan pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik**,** lokakarya penggunaan bahasa di ruang publik**,** sosialisasi hasil lokakarya pemartabatan bahasa di ruang publik**,** lomba pemartabatan bahasa negara di ruang publik**,** anugerah Kawistara, penandatanganan nota kesepahaman, hingga diterbitkannya Peraturan Wali kota Bogor.

Tidak hanya itu, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pun menyambut baik dan menindaklanjuti program pemartabatan bahasa negara di ruang publik ini dengan baik. Pemerintah Kota Bogor dan dinas-dinas terkait sangat membantu kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik ini. Mereka semua sadar betul bahwa ini merupakan tugas bersama untuk saling membantu dan melaksanakan pemartabatan bahasa negara di ruang publik.

Komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor terlihat dalam kemauan politik pemimpin daerah, staf dan pelaksana yang

kompeten, serta dibuatnya peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan komitmennya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

a) Kemauan Politik Pemimpin Daerah

Dalam mencapai tujuan untuk memartabatkan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor dibutuhkan kemauan politik pemimpin daerah yang dapat mengapresiasi kegiatan pemartabatan bahasa negara. Kemauan politik pemimpin daerah ini dapat dilihat dari bentuk dukungannya setiap kali kegiatan dilaksanakan, Wali Kota Bogor selalu menyempatkan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, pemimpin daerah juga kerap kali memperlihatkan sikap berbahasa yang baik dalam media sosial.

Sikap pemimpin yang terbuka dan memberi dukungan penuh terhadap kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik ini ditunjukkan dengan menerima kunjungan Balai Bahasa Jawa Barat untuk membicarakan langkah-langkah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Sikap pemimpin daerah seperti ini sangat positif dalam mewujudkan penegakan peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, Wali Kota Bogor juga aktif menjadi narasumber sosialisasi pemartabatan bahasa negara di ruang publik yang diselenggarakan di Kota Bogor.

Kegiatan Sosialisasi Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan mendapatkan kawasan tertib berbahasa sebagai contoh kawasan untuk pembelajaran bahasa. Tujuan khususnya adalah untuk menyosialisasikan hasil lokakarya yang telah dilaksanakan pada tanggal 10—12 Juni 2015, di Hotel Sukajadi, Jalan Sukajadi Nomor 176, Bandung.

Sosialisasi Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan berbentuk pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Kota Bogor, melibatkan sejumlah unsur masyarakat, yaitu instansi pemerintah, pengusaha atau pengelola hotel, pengusaha atau pengelola restoran/rumah makan/kafe, pengusaha atau pengelola tempat hiburan, anggota PHRI, anggota Asita, pengelola biro perjalanan wisata, Ikatan Mojang dan Jajaka, dan media.

Sosialisasi Hasil Lokakarya Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik di Kota Bogor dilaksanakan di Hotel Salak, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 8, Bogor pada tanggal 20 Oktober 2015. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Wali Kota Bogor (Dr. Bima

Arya), Ketua PHRI, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, serta Kepala Balai Bahasa Jawa Barat. Sementara yang menjadi peserta sosialisasi tersebut adalah para pengusaha hotel, pengusaha restoran, mahasiswa, guru, komunitas, wartawan, dan staf pemda Kota Bogor.

Sosialisasi Hasil Lokakarya Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik di Kota Bogor yang kedua dilaksanakan Hotel Salak, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 8, Bogor pada tanggal 10 Desember 2015 dengan narasumber Sekda Kota Bogor (Drs. H. Ade Sarip Hidayat, M.Pd.), Kepala Subbidang Pengolahan, Bidang Kesra, BPPTPPM Kota Bogor (Debbi Wismonto), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, serta Kepala Balai Bahasa Jawa Barat. Sementara yang diundang untuk menjadi peserta adalah pejabat pemerintah, manajer rumah sakit, pengelola museum, manajer hotel, pemilik rumah makan/restoran, dan pengelola objek wisata di Kota Bogor

Sosialisasi Hasil Lokakarya Penggunaan Bahasa di Ruang Publik di Kota Bogor yang ketiga dilaksanakan di Hotel The Mirah Bogor pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan mengundang pengusaha hotel, tempat wisata, dan tempat hiburan, serta pusat perbelanjaan. Pada acara Sosialisasi tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, H. Shahlan Rasyidi, S.E., M.M. menjadi narasumber. Wali Kota Bogor, Bima Arya yang membuka acara sosialisasi itu sangat mendukung penggunaan bahasa negara di ruang publik.

Kegiatan “Lomba Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik” kemudian diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan “Sosialisasi Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik di Kota Bogor”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bahasa negara yang dimanifestasikan dalam penggunaan papan nama dan papan petunjuk di ruang publik yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian akan tumbuh kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Lomba ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif masyarakat untuk memiliki kesadaran -tanpa paksaan- terhadap pengutamaan penggunaan bahasa negara, terutama di ruang publik. Jadi, kegiatan lomba ini sebenarnya merupakan bagian dari aksi penertiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Balai Bahasa Jawa Barat ingin melaksanakan aksi penertiban yang bersifat humanis dan tanpa paksaan, tetapi atas kesadaran pribadi. Dengan lomba ini para pengusaha perhotelan, tempat wisata dan tempat hiburan, serta pusat perbelanjaan yang sudah mengutamakan penggunaan bahasa negara di lingkungan sendiri diberikan penghargaan atas nama wali kota. Diharapkan kegiatan lomba ini dapat memotivasi para pengusaha lainnya untuk memartabatkan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Di Kota Bogor telah dilaksanakan kegiatan lomba selama tiga kali berturut-turut.

Dalam kegiatan lomba tersebut, Wali Kota mendukung dengan mengeluarkan surat edaran tentang lomba tersebut yang diedarkan kepada peserta lomba. Pada akhir lomba dipilih peserta dengan pemakaian bahasa terbaik dan pemenang yang memenangi lomba mendapat hadiah piala wali kota dan prasasti dengan tanda tangan wali kota. Hadiah lomba diberikan oleh wali kota bersamaan dengan agenda acara yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Prasasti lomba bagi pemenang itu wajib ditempatkan di ruang utama hotel yang bersangkutan sehingga setiap orang yang hadir di hotel tersebut akan membaca prasasti tersebut. Prasasti itu menyebutkan bahwa hotel ini telah memenangi lomba pemartabatan bahasa negara yang diadakan oleh bupati/wali kota. Dengan cara lomba itu secara tidak langsung semua hotel telah menertibkan bahasanya dan telah berusaha memartabatkan bahasa negara. Lomba juga dilakukan pada semua ranah, yaitu pusat belanja, rumah sakit, tempat wisata, museum, dan yang lain sesuai dengan kondisi dan kesepakatan dengan pemerintah kota/kabupaten.

Dari rangkaian kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor dapat terlihat kemauan politik dari pimpinan daerahnya, dalam hal ini Wali Kota Bogor. Pelaksanaan komitmen pemimpin daerah ini juga tidak hanya sekadar janji seremonial yang diucapkan ketika sosialisasi, tetapi diperlihatkan dalam bentuk perwujudan nyata lahirnya Nota Kesepahaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kota Bogor.

Kota Bogor menjadi kota pertama yang menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kota Bogor tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Penandatanganan dilakukan langsung Wali Kota Bogor dan Kepala Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud di sela acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kota

Bogor di Hotel Seruni Cisarua, 13 Desember 2017. Tujuan utama dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di wilayah Kota Bogor.

Penandatangan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari upaya dan langkah terus menerus Pemerintah Kota Bogor dalam upaya melakukan permartabatan bahasa negara di ruang publik. Langkah-langkah ini lahir setelah semakin banyaknya pemakaian bahasa di ruang publik, seperti papan nama, papan petunjuk yang menggunakan bahasa asing atau campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Padahal penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

b) Staf dan Pelaksana yang Kompeten

Dalam melaksanakan komitmen pemimpin daerah diperlukan dukungan dari staf dan pelaksana yang kompeten. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satu peranan pemimpin dalam peningkatan pelayanan publiknya adalah dengan memotivasi bawahannya. Di sinilah peran pemimpin berfungsi untuk dapat berperan aktif dalam mengoordinasikan semua bawahan di lingkungan birokrasi.

Komitmen pemimpin dapat dikatakan berhasil apabila pemimpin dapat berperan aktif dalam menjalankan perannya untuk bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Pemimpin dalam menjalankan perannya dalam memberikan pengaruh kepada bawahannya sehingga dapat merealisasikan program pemartabatan bahasa negara di ruang publik ini. Selain itu, pemimpin daerah juga giat memberikan dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik, Balai Bahasa Jawa Barat selalu didampingi oleh staf dan pelaksana dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Pendampingan ini bersifat koodinatif, artinya staf dan pelaksana dari pemda Kota Bogor bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Barat dalam melaksanakan program pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Kerja sama ini dilakukan dalam mulai dari pendampingan ketika mengambil data foto di ruang-ruang publik di Kota Bogor, mengundang peserta sosialisasi, hingga membuat surat edaran wali

kota untuk lomba pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Dalam melaksanakan kegiatan ini, staf dan pelaksana dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sangat membantu pihak Balai Bahasa Jawa Barat.

Pemimpin daerah dalam hal ini sangat mendukung program pemartabatan bahasa negara di ruang publik, terlihat dari perannya dalam memengaruhi bawahannya. Pemimpin daerah memberikan pengaruh yang baik kepada staf dan pelaksana di daerah sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan program pemartabatan bahasa negara di ruang publik.

c) Dibuatnya Peraturan

Komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor selain diwujudkan dalam bentuk kemauan politik dari pemimpin daerah dan dukungan dari staf serta pelaksana, juga diwujudkan dalam pembuatan peraturan mengenai pemartabatan bahasa negara di ruang publik.

Penerbitan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2017 Seri E Tanggal 24 November 2017. Hal ini membuktikan bahwa komitmen dari pemimpin daerah tidak hanya berupa janji, tetapi diwujudkan dalam sebuah bentuk peraturan yang dibuat untuk dapat mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Tentunya penerbitan peraturan ini juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia yang mendorong pemimpin daerah Kota Bogor untuk merasa perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan bahwa komitmen pemimpin daerah di Kota Bogor dalam rangka pemartabatan bahasa negara di ruang

publik sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari kemauan politik pemimpin daerah yang sangat mengapresiasi kegiatan pemartabatan bahasa negara. Kemauan politik pemimpin daerah ini dapat dilihat dari bentuk dukungannya setiap kali kegiatan dilaksanakan, aktif menjadi narasumber sosialisasi pemartabatan bahasa negara di ruang publik, mengeluarkan surat edaran tentang lomba pemartabatan bahasa negara di ruang publik, dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kota Bogor tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Hadirnya dukungan dari staf dan pelaksana yang kompeten juga merupakan bentuk keberhasilan komitmen pemimpin daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Namun, yang paling utama adalah komitmen pemimpin daerah dalam pemartabatan bahasa negara di ruang publik di Kota Bogor diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik. Hal ini membuktikan bahwa komitmen dari pemimpin daerah tidak hanya berupa janji, tetapi diwujudkan dalam sebuah bentuk peraturan yang dibuat untuk dapat mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Balai Bahasa Jawa Barat. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Bandung: Balai Bahasa Jawa Barat.

Khak, Muh. Abdul. *Et Al.* (2016). *Senarai Istilah Asing-Indonesia di Ruang Publik.* Bandung: Balai Bahasa Jawa Barat.

Pasolong, Harbani. (2015). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahyusumidjo. (1994). *Kiat Kepemimpinan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI – Jakarta